

## **LAPORAN PPM**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) BERBASIS KOMUNITAS DI KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL**



Oleh:

**Dwi Harsono, MPA, MA (NIP. 19740115 200112 1 001 )  
Marita Ahdiyana, M. Si (NIP. 19730318 200812 2 001)  
Kurnia Nur Fitriana, S. IP (NIP. 19850623 200812 2 002)  
Oktaviani (NIM. 10417141010)  
Deby Febriyan Eprilianto (NIM. 10417141007)  
Mifta Damai Rianingtyas (NIM. 0941714403)**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**TAHUN 2013**

**Pengabdian Pada Masyarakat ini dibiayai dengan Dana DIPA FIS UNY Tahun 2013  
SK Dekan FIS UNY Nomor: 96 Tahun 2013, Tanggal 29 April 2013  
Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat  
Nomor: 26/UN34.14/PM/2013, Tanggal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Abstrak

Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi	1
B. Tinjauan Pustaka	4
C. Identifikasi dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Kegiatan	11
E. Manfaat Kegiatan	11

### BAB II METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran	12
B. Metode yang Digunakan	12
C. Langkah-langkah Kegiatan	14

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	16
B. Pembahasan	17
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan	20
D. Organisasi Pelaksana	22

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Abstrak

PKK sebagai institusi yang berhubungan erat dengan sistem pemerintah maupun masyarakat memandang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi terhadap kinerja kelembagaan penyediaan data dan informasi. Sehingga inovasi baru dalam proses administrasi untuk memudahkan pencatatan dan pemrosesan data dari tingkat desa/wilayah sampai dengan tingkat kabupaten/kota diwujudkan dalam SIM PKK. Data yang ada dalam format SIM PKK sangat berguna untuk penyediaan data yang akurat bagi pengambilan kebijakan dan pembangunan. Namun demikian peran anggota, kader dan pengurus PKK di desa-desa di Kecamatan Imogiri dalam melaksanakan pengisian data format SIM PKK belum optimal sehingga menghambat ketersediaan data akurat yang dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sehingga kegiatan PPM ini memiliki urgensi terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya peran PKK dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya (penyelesaian masalah berbasis komunitas), serta mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan melalui SIM PKK. Khalayak sasaran yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pengurus, anggota, dan kader PKK dari delapan Tim Penggerak Desa di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta praktik langsung pengisian format SIM PKK. Peserta *workshop* dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing peserta. Dalam *workshop* ini, peserta diharapkan secara langsung mempraktikkan pengisian format SIM PKK yang telah diunduh dari laman PKK Provinsi DIY. Pengisian dilakukan oleh peserta lokakarya sesuai dengan data yang merupakan tugas mereka sesuai pokja masing-masing dalam organisasi PKK Kecamatan/Desa. Tim pengabdian secara langsung memandu cara pengisian format isian SIM PKK sesuai ketentuan yang ada, dan peserta dapat mendiskusikannya dengan pemandu jika menghadapi permasalahan.

Secara keseluruhan kegiatan PPM telah berjalan baik dan mendapat tanggapan positif dari peserta. Walaupun tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri belum serta merta dapat terlaksana, namun demikian tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul telah terlaksana. Sebagian peserta telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang SIM PKK serta manfaatnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan data akurat bagi pengambilan kebijakan dan pembangunan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, SIM PKK, basis komunitas.

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Analisis Situasi**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan berbagai kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif maka di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa telah dibentuk Tim Pembina (TP) PKK yang fungsinya selain mengkoordinir kegiatan, juga memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.

Peningkatan minat yang tinggi terhadap gagasan-gagasan modal sosial dan masyarakat madani mendorong pemikiran tentang organisasi PKK sebagai modal sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Ife dan Tesoriero, gagasan modal sosial adalah bahwa seseorang dapat melakukan investasi sosial sebagaimana secara ekonomis, dan bahwa modal ekonomis dari suatu masyarakat dapat bertambah, jika ini terjadi atas biaya modal sosial maka perolehan tersebut bersifat semu (2008: 35). Modal sosial dapat dilihat sebagai perekat yang menyatukan masyarakat, hubungan-hubungan antar manusia. Orang melakukan apa yang dilakukannya terhadap sesamanya karena adanya kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial dan komunitas. Bagian dari membangun modal sosial adalah memperkuat masyarakat madani. Sedangkan menurut Coleman (1988) dan Putnam (1993), dalam Ostrom (1994: 20), modal sosial adalah pengetahuan yang dibagi, pemahaman, dan pola-pola interaksi yang dibawa kelompok atau individu pada kegiatan produktif. Hal tersebut tercipta ketika individu belajar saling percaya satu dengan yang lain sehingga mereka mampu membuat komitmen

yang dapat dipercaya dan bersandar pada bentuk umum resiprositas daripada pada rangkaian sempit hubungan kompensasi khusus.

PKK sebagai institusi yang sangat erat hubungannya dengan sistem pemerintah maupun masyarakat memandang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berimplikasi sangat luas terhadap kinerja kelembagaan penyediaan data dan informasi dalam menunjang kebijakan serta pembangunan daerah. Sehingga PKK Kota Yogyakarta, sejalan dengan program yang telah diagendakan oleh PKK tingkat Pusat, telah menelorkan inovasi baru dalam proses administrasinya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan, pemrosesan data dari tingkat desa wisata sampai dengan tingkat kota. Program Sistem Informasi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK untuk Kota Yogyakarta telah diujicobakan di wilayah PKK Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan. Penerapan program ini juga sejalan dengan program dari PKK Pusat yang bertujuan untuk lebih memudahkan pengarsipan, pencatatan dan penyelesaian masalah serta penyusunan program-program pembangunan pada masa yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi yang lebih akurat. Selain itu, Tim Penggerak PKK Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan juga telah menerapkan inovasi baru dalam proses administrasi melalui sistem informasi posyandu dan SIM PKK.

Mendapatkan ilmu yang mendukung kegiatan PKK dan berguna bagi masyarakat, keluarga, dan semua anggota PKK merupakan hal yang sangat penting bagi kader-kader PKK. Tujuan SIM PKK adalah tersedianya data informasi warga binaan dan kader PKK yang akurat yang selanjutnya akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. SIM tersebut membantu pemerintah untuk menerapkan pembangunan yang tepat sasaran yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. PKK juga dapat berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya demi

kemajuan masyarakat luas. Sebagai contoh adalah peran PKK dalam pola penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan masyarakat atau berbasis komunitas di Kelurahan Sambek Kabupaten Wonosobo.

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan SIM PKK belum sepenuhnya menerapkan data dari tingkat Dasa Wisma ke Desa berlanjut ke Kecamatan dan ke Kota/Kabupaten dalam satu provinsi dengan menggunakan SIM terpadu berbasis komputer. Artinya pelaksanaan SIM PKK masih pada tahap rintisan, dengan melakukan isian data pada format SIM PKK dan Sistem Informasi Posyandu yang dapat diunduh pada laman SIM PKK Provinsi DIY. SIM PKK dalam hal ini merupakan data yang terintegrasi dalam laman yang diunggah oleh PKK Pemerintah Provinsi DIY. Dalam laman tersebut sudah tersedia format isian SIM PKK dan Sistem Informasi Posyandu, serta opsi untuk mengunggah input data per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Format SIM PKK berisi lembar isian yang terdiri dari 26 lampiran yang dapat mengungkap semua data dari masyarakat mulai dari tingkat dasa wisma. Data tersebut meliputi data lengkap keluarga, keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana, Posyandu, asuransi kesehatan, tingkat kemampuan ekonomi sosial masyarakat, dan lain-lain data lengkap tentang kondisi warga mulai dari level satuan keluarga. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pada masa yang akan datang diharapkan pelaksanaan SIM PKK berbasis komputer akan dapat diimplementasikan.

Walaupun di Kota Yogyakarta perintisan dan uji coba penerapan SIM PKK telah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2010 serta telah menjadi program PKK Pusat, namun di Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan Imogiri, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Sehingga Format isian SIM PKK yang telah disosialisasikan oleh kader PKK tingkat kecamatan hanya tersimpan rapi pada kelompok-kelompok Dasawisma yang tersebar pada berbagai dusun di berbagai Desa di

Kecamatan Imogiri. Kendala tersebut terutama terletak pada belum optimalnya peran anggota, kader dan pengurus PKK di Desa-Desa di Kecamatan Imogiri Bantul dalam melaksanakan pengisian data format SIM PKK, sehingga menghambat ketersediaan data akurat yang dibutuhkan bagi program pembangunan. Selain itu juga masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, dan belum tersedianya data akurat yang merupakan informasi yang ada dalam format SIM PKK. Padahal data tersebut diharapkan dapat menjadi data input bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Imogiri untuk diteruskan ke Kabupaten Bantul. Sehingga kegiatan PPM ini dinilai memiliki urgensi terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya peran PKK dalam penyediaan SIM yang diharapkan berguna bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan peran tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa lokakarya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sehingga pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 77). Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang

secara pengetahuan, sikap, maupun praktik kurang berdaya, menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya material dan nonmaterial adalah sangat penting. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Payne, tindakan tersebut terkait dengan masyarakat itu sendiri termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (1997: 226).

Sedangkan dalam perspektif pemberdayaan menurut pandangan Sutrisno (2000: 185), masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sumber daya pembangunan, termasuk sumber daya material jika ada. Sumber daya tersebut dapat berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Adalah menjadi tanggung jawab masyarakat kemudian untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan. Karena dalam pembangunan yang bersifat partisipatif keberadaan sumber daya tetap dalam kewenangan pemerintah. Menurut Ife (1995), pemberdayaan merupakan upaya penyediaan terhadap masyarakat atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depan, serta berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Cook dan Macaulay (1997), dalam Koirudin (2005: 145-146), mengemukakan teori pemberdayaan ACTOR, dengan mengacu pada kerangka dasar sebagai berikut:



- a. *Authority*: masyarakat atau kelompok diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau etos kerja menjadi yang dimiliki mereka sendiri.
- b. *Confidence and competence*: menimbulkan rasa percaya diri dan melihat kemampuan mereka untuk dapat mengubah suatu keadaan.
- c. *Trust*: menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk berubah dan semangat untuk bisa.
- d. *Opportunity*: memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.
- e. *Responsibilities*: melakukan pengelolaan dalam melakukan perubahan, dan meletakkan tanggung jawab dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik.
- f. *Support*: untuk menjadi lebih baik, perlu dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pemberdayaan merupakan suatu sikap yang harus muncul dalam diri manusia, dimana setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan, dalam bentuk kemampuan diri yang ada. Hal pokok yang penting adalah bagaimana potensi tersebut dibangkitkan agar dapat berkembang dan berdaya. Walaupun rumusan konsep pemberdayaan yang dikemukakan antara ahli yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan tertentu, namun pada dasarnya pemberdayaan dapat dikatakan sebagai upaya terencana yang didesain untuk melakukan perubahan atau pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat. Perubahan tersebut meliputi keadaan tidak/kurang berdaya menjadi lebih berdaya dengan fokus pada pembinaan potensi menuju kemandirian masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kekuatan penuh untuk menentukan masa depan mereka. Dalam pada itu, peran dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) hanyalah merupakan partisipan, motivator, dan stimulan saja.

## **2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Menurut Kadir, sistem informasi manajemen merupakan salah satu jenis sistem informasi, yang secara khusus ditujukan untuk menghasilkan informasi bagi pihak manajemen dan untuk pengambil keputusan (2003:11). Berdasarkan dukungan yang diberikan pada kepada pemakai, sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh jenis, salah satunya adalah SIM. Berbagai laporan yang dihasilkan oleh SIM berupa laporan periodis, laporan ikhtisar, laporan perkecualian, dan laporan perbandingan. Laporan periodis adalah laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Sedangkan laporan ikhtisar adalah laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data/informasi. Ditambahkan Kadir, SIM dapat dipakai pada semua level manajemen. SIM berfungsi untuk mengkonversi data yang berasal dari sistem pemrosesan transaksi. Data tersebut diolah menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja (2003: 109).

PKK memiliki sepuluh program pokok yang kemudian lebih dikenal sebagai Sepuluh Program Pokok PKK. Kesepuluh program pokok tersebut adalah:

- (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- (2) Gotong royong;
- (3) Pangan ;
- (4) Sandang;
- (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;
- (6) Pendidikan dan ketrampilan;
- (7) Kesehatan;
- (8) Pengembangan kehidupan koperasi;

(9) Kelestarian lingkungan hidup;

(10) Perencanaan sehat.

Dengan sepuluh program pokok PKK yang ada, dapat diketahui secara jelas bahwa TP PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka TP PKK membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dengan spesifikasi penanganan yang khusus. Empat Pokja tersebut berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi di antara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. TP PKK baik ditingkat propinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dan ibu-ibu anggota dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan tersebut di bawa dan diterapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing.

SIM PKK merupakan data yang terintegrasi dalam laman yang diunggah oleh PKK Pemerintah Provinsi DIY. Dalam laman tersebut sudah tersedia format isian SIM PKK dan Sistem Informasi Posyandu, serta opsi untuk mengunggah input data per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

### **3. Pembangunan Berbasis Komunitas (*Community Based*)**

Pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik, berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan direncanakan tersebut melalui pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Sehingga pembangunan tidak hanya sekedar bermakna pembangunan ekonomi atau industrialisasi saja. Dalam suatu proses pembangunan terkandung nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah.

Friedman, Mayo & Craig, Rahman (19) dalam Amien (2005: 159) mengemukakan beberapa teori pembangunan partisipatoris:

- a. Teori pembangunan masyarakat (*community development*),
- b. Teori pengorganisasian masyarakat (*community organized*),
- c. Teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Konsep-konsep pembangunan partisipatoris ini akan menghasilkan proyek-proyek pembangunan yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. *Community-oriented*: berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- b. *Community-based*: didasarkan pada sumber daya yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. *Community-managed*: dikelola dengan partisipasi aktif para anggota masyarakat (Mila Reforma, 1996, dalam Sidik, 2005: 142).

Pembangunan berbasis masyarakat hanya dapat dilakukan jika ada masyarakat yang menjadi basisnya. Dikemukakan Soetomo (2008: 395), bahwa pembangunan berbasis komunitas merupakan perspektif pembangunan yang berpusat pada rakyat. Konsep ini merupakan koreksi atas perspektif pembangunan konvensional yang berorientasi produksi. Pengembangan masyarakat akhir-akhir ini dipandang sebagai proses pembentukan, atau pembentukan kembali, struktur-struktur masyarakat yang memungkinkan berbagai cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasi kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia (Ife dan Tesoriero, 2008: 3). Dalam konteks ini kerja masyarakat dilihat sebagai suatu kegiatan, atau praktik seorang yang berusaha memfasilitasi proses pengembangan masyarakat tersebut, dengan cara dibayar atau tidak dalam melakukan peran tersebut.

### C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis masalah yang telah dilakukan, terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian untuk dipecahkan. Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul adalah:

1. Peran anggota, kader dan pengurus PKK di desa-desa di Kecamatan Imogiri Bantul dalam melaksanakan pengisian data format SIM PKK belum optimal, sehingga menghambat ketersediaan data akurat yang dibutuhkan bagi program pembangunan.
2. Masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka (*community based problem solving*).
3. Belum tersedianya data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan melalui penerapan SIM PKK.

Untuk memperjelas permasalahan yang harus dipecahkan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya untuk menggugah kesadaran dan meningkatkan peran anggota, kader dan pengurus PKK di Desa-Desa di Kecamatan Imogiri Bantul dalam melaksanakan pengisian data format SIM PKK?
2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka melalui penyelesaian masalah berbasis komunitas?
3. Bagaimana mendukung tercapainya tujuan penyediaan data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan melalui penerapan SIM PKK di Kecamatan Imogiri?

#### **D. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK.
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya (penyelesaian masalah berbasis komunitas).
3. Mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan melalui SIM PKK.

#### **E. Manfaat Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Kegiatan PPM diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan mendorong peran anggota dan kader PKK dalam penerapan SIM PKK. Mereka juga diharapkan dapat turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya (penyelesaian masalah berbasis komunitas).

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Kegiatan SIM PKK ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dengan menerapkan pembangunan yang tepat sasaran yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya penyediaan data akurat dari SIM PKK sebagai inputnya.

## **BAB II**

### **METODE KEGIATAN PPM**

#### **A. Khalayak Sasaran**

Khayalak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebanyak 38 orang pengurus, anggota, dan kader PKK dari delapan Tim Penggerak Desa di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Desa di Kecamatan Imogiri meliputi: Desa Wukirsari, Desa Imogiri, Desa Karang Talun, Desa Giri Rejo, Desa Karang Tengah, Desa Kebon Agung, Desa Sriharjo, dan Desa Selopamioro.

#### **B. Metode yang Digunakan**

Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan beberapa metode berikut:

##### **1. Ceramah dan Tanya Jawab**

Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi terkait peran penting pengurus, anggota dan kader PKK di Kecamatan Imogiri sebagai modal sosial untuk memperkuat masyarakat madani. Melalui peran mereka, sesungguhnya dalam masyarakat telah ada modal berharga yang jika diberdayakan dengan baik akan menjadi kekuatan besar bagi pembangunan. Selanjutnya pemberian materi tentang penerapan SIM PKK. Pengisian data dalam format SIM PKK dimulai dari tingkat Dasawisma sebagai basisnya, tingkat Dusun/Dukuh kemudian direkap pada tingkat Desa dilanjutkan tingkat kecamatan merupakan input data yang penting bagi SIM PKK Kabupaten Bantul. Dengan demikian data tersebut mampu mendukung ketersediaan data akurat dan penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan di Kecamatan Imogiri, dan secara luas di Kabupaten Bantul, serta Provinsi DIY.

Kegiatan ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan mendorong anggota dan kader PKK dalam peran mereka mengumpulkan data dalam SIM PKK untuk memberikan data akurat bagi pembangunan. Selain itu juga disampaikan materi berkaitan dengan bagaimana peran yang dapat dimainkan oleh pengurus, kader, dan anggota PKK terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dalam lingkungan tempat tinggal mereka (penyelesaian masalah berbasis komunitas). Sehingga organisasi PKK sebagai modal sosial yang sudah ada dalam masyarakat selama beberapa waktu lamanya dapat lebih aktif berperan dalam pembangunan masyarakat.

3. Lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Peserta *workshop* dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing peserta. Kelompok 1 bagi peserta sekretaris PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 2 bagi Ketua Pokja 1/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 3 bagi Ketua Pokja II/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 4 bagi Ketua Pokja III/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Serta kelompok 5 bagi Ketua Pokja IV/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Dalam *workshop* ini, peserta diharapkan secara langsung mempraktikkan pengisian format SIM PKK yang telah diunduh dari laman PKK Provinsi DIY. Pengisian dilakukan oleh peserta lokakarya sesuai dengan data yang merupakan tugas mereka sesuai pokja masing-masing dalam organisasi PKK Kecamatan/Desa.



### C. Langkah-langkah Kegiatan

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka alternatif pemecahan masalah yang dipilih adalah berupa lokakarya/ *workshop* pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Hal tersebut akan dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian materi terkait peran penting pengurus, anggota dan kader PKK di Kecamatan Imogiri sebagai modal sosial untuk memperkuat masyarakat madani.
2. Pemberian materi tentang pentingnya kesadaran kader, pengurus dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK.
3. Pemberian materi berkaitan dengan peran yang dapat dimainkan oleh pengurus, kader, dan anggota PKK dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam lingkungan tempat tinggal mereka (penyelesaian masalah berbasis komunitas).
4. Pelaksanaan lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Hal tersebut dilakukan dengan membagi peserta *workshop* dalam 5 kelompok sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing peserta. Kelompok 1 bagi peserta sekretaris PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 2 bagi Ketua Pokja 1/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 3 bagi Ketua Pokja II/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 4 bagi Ketua Pokja III/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Serta kelompok 5 bagi Ketua Pokja IV/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya peserta secara langsung mempraktikkan pengisian format SIM PKK yang telah diunduh dari laman PKK Provinsi DIY. Pengisian dilakukan oleh peserta lokakarya sesuai

dengan data yang merupakan tugas mereka sesuai pokja masing-masing dalam organisasi PKK Kecamatan/Desa.

Tolok ukur yang digunakan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan lokakarya/ *workshop* pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 30 peserta
2. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, motivasi dan kesadaran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK akan semakin meningkat.
3. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, kader dan anggota PKK diharapkan mulai berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya (penyelesaian masalah berbasis komunitas).
4. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, kesadaran anggota dan kader PKK dalam mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui SIM PKK mengalami peningkatan.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

#### A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PPM lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 23 September 2013 dan 24 September 2013, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta pelatihan mencapai 126 % dari jumlah peserta yang ditargetkan, hal ini menunjukkan minat yang tinggi dari para peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dalam kegiatan lokakarya/ *workshop* pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas.
2. Dari diskusi yang dilakukan dengan peserta terungkap bahwa selama ini mereka telah melakukan pengisian data yang ada dalam lampiran format SIM PKK. Namun mereka belum mengetahui bahwa data tersebut adalah merupakan bagian dari SIM PKK dan mereka juga belum mengetahui manfaat dan kegunaan data tersebut bagi pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya adanya lokakarya ini kesadaran kader dan anggota serta pengurus dalam penerapan SIM PKK dapat semakin meningkat.
3. Pelatihan diakhiri dengan Lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Peserta *workshop* dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing peserta. Kelompok 1 bagi peserta sekretaris PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 2 bagi Ketua Pokja I/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 3 bagi Ketua Pokja II/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Kelompok 4 bagi Ketua Pokja III/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Serta kelompok 5 bagi Ketua Pokja IV/anggota PKK kelurahan dan kecamatan. Dalam *workshop* ini, peserta secara langsung telah mempraktikkan pengisian format SIM PKK yang telah diunduh

dari laman PKK Provinsi DIY. Pengisian dilakukan oleh peserta lokakarya sesuai dengan data yang merupakan tugas mereka sesuai pokja masing-masing dalam organisasi PKK Kecamatan/Desa.

4. Setelah pelaksanaan lokakarya, peserta lebih termotivasi untuk mulai mencermati dan mengisi lembar-lembar format SIM PKK yang sudah diterima mulai dari tingkat Dasa Wisma. Selama ini mereka hanya mendapatkan informasi bahwa lembar isian tersebut hanya merupakan pencatatan saja, dan mereka belum pernah mendengar tentang istilah SIM PKK. Sehingga dengan adanya lokakarya ini mereka merasa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih tentang SIM PKK dan manfaat data tersebut bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah kabupaten/kota jika dapat dilaksanakan. Ketua Tim Penggerak PKK dan kader, pengurus serta anggota PKK juga berharap lokakarya ini dapat dilaksanakan pada tiap Dasa wisma sebagai basis pengisian data, serta merupakan langkah awal bagi rintisan penerapan SIM PKK tingkat kabupaten.

## **B. Pembahasan**

1. Target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 30 peserta

Dari target peserta pelatihan yang ditetapkan sejumlah 30 peserta, ternyata jumlah peserta pelatihan yang hadir jauh melebihi target yaitu sejumlah 38 orang peserta. Peserta pelatihan adalah 38 orang pengurus, anggota, dan kader PKK dari delapan Tim Penggerak Desa di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Desa di Kecamatan Imogiri meliputi: Desa Wukirsari, Desa Imogiri, Desa Karang Talun, Desa Giri Rejo, Desa Karang Tengah, Desa Kebon Agung, Desa Sriharjo, dan Desa Selopamioro.

2. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, motivasi dan kesadaran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK akan semakin meningkat.

Dari tanya jawab yang dilakukan selama penyampaian materi terungkap bahwa sebenarnya kader, pengurus, dan anggota PKK di Kecamatan Imogiri telah mempraktikkan pendataan bagi pengisian format yang ada dalam SIM PKK. Namun mereka belum mengetahui bahwa yang mereka praktikkan tersebut adalah bagian dari penerapan SIM PKK. Hal tersebut terungkap dari hasil diskusi yang dilakukan dengan peserta bahwa ternyata warga PKK di tingkat Dasa Wisma di semua desa di Kecamatan Imogiri telah menerima lampiran format SIM PKK seperti yang dapat diunduh dari laman SIM PKK. Namun demikian, selama ini lampiran tersebut hanya disimpan secara rapi oleh para kader, pengurus dan anggota PKK di tingkat Dasa Wisma, serta belum ada tindak lanjut untuk mengisinya, apalagi untuk mengumpulkan format yang telah diisi. Pengisian secara lengkap baru ditemukan di Dusun IV Desa Imogiri, namun demikian hal tersebut lebih disebabkan untuk keperluan lomba desa, bukan karena ketertiban pengisian data.

Dalam diskusi dengan peserta juga terungkap bahwa para pengurus dan kader PKK belum mengetahui bahwa lampiran format tersebut adalah bagian dari SIM PKK. Mereka juga merasa bahwa pengisian kolom-kolom format isian PKK yang berjumlah 26 lampiran sangat berat. Selain disebabkan oleh banyaknya data yang harus diisi juga karena kesulitan untuk melakukan regenerasi pengurus dan kader PKK yang mau melaksanakan tugas tersebut. Karena selama ini yang bersedia melaksanakan kegiatan pengisian data format SIM PKK jumlahnya sangat terbatas. Kendala lain yang ditemui dalam pengisian data adalah bahwa kondisi yang ada dalam masyarakat sendiri bersifat sangat dinamis, sehingga ketika kader PKK telah

melakukan pengisian data, selang beberapa waktu kemudian data tersebut telah mengalami perubahan.

3. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, kader dan anggota PKK diharapkan mulai berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya (penyelesaian masalah berbasis komunitas).

Sebenarnya dalam kehidupan yang masih kental suasana kekeluargaannya di perkampungan, ibu-ibu PKK memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Namun demikian kendala utama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat misalnya penyakit masyarakat (pekat) terletak pada pelaku sendiri. Artinya bahwa pelaku (orang yang bermasalah) kadang sudah melakukan perbuatan dengan modal nekad, sehingga sering tidak peduli dengan pandangan dan hasil musyawarah masyarakat di mana dia tinggal. Sehingga kemudian yang terjadi masyarakat menjadi enggan dan malas menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat tersebut. Sehingga dalam lokakarya juga ditambahkan bahwa jika permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut berkaitan dengan tindakan melawan hukum, maka masyarakat dihimbau untuk melaporkan ke pihak yang berwajib jika pelakunya sudah tidak mempan diberi nasihat atau tindakan dari warga.

4. Setelah mengikuti kegiatan lokakarya, kesadaran anggota dan kader PKK dalam mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan data akurat bagi input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui SIM PKK mengalami peningkatan.

Dari diskusi yang dilakukan dengan peserta lokakarya, terungkap bahwa mereka memang belum mengetahui bahwa data yang selama ini sudah mereka praktikkan

adalah bagian dari format isian SIM PKK. Sehingga kemudian para peserta mempertanyakan apakah SIM PKK yang disampaikan oleh tim pengabdian sama dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini. Mereka menganggap jika hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda maka hal tersebut hanya akan menambah beban kader, pengurus dan anggota PKK dalam pengisian data yang selama ini sudah mereka anggap cukup berat. Namun setelah mendapat penjelasan dari tim pengabdian bahwa SIM PKK yang disosialisasikan adalah merupakan format yang ada dalam program resmi pemerintah dari tingkat pusat, para peserta menyatakan kelegaannya.

Pemahaman baru para peserta bahwa data yang diisikan dalam format SIM PKK sangat penting bagi pengambilan kebijakan dan pembangunan dapat menambah semangat peserta untuk melakukan pengisian data. Selama ini mereka belum mengetahui manfaat dari lembaran-lembaran format isian data yang mereka isi. Walaupun demikian masih terdapat kendala utama dalam pencatatan yang tertib dalam format isian SIM PKK, yaitu keterbatasan jumlah kader yang mau melakukan tugas tersebut disebabkan regenerasi pengurus dan kader yang kurang berjalan baik. Hanya kader tertentu yang mau melaksanakan tugas tersebut.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan**

Faktor pendukung kegiatan lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Imogiri menyambut dengan baik kegiatan lokakarya pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri, karena diharapkan akan membawa manfaat terutama dalam

menambah pengetahuan dan menggugah semangat kader dan pengurus PKK dalam pengisian data format SIM PKK yang diharapkan dapat menjadi input pengambilan kebijakan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Selama ini juga belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi SIM PKK.

2. Semangat dan antusiasme peserta lokakarya untuk hadir dalam kegiatan cukup tinggi, hal tersebut terbukti dengan tingkat kehadiran mereka yang cukup tinggi, melebihi target peserta yang ditetapkan, serta keaktifan mereka dalam diskusi. Selama ini para peserta sudah aktif dalam pertemuan rutin PKK tingkat Kecamatan yang rutin dilakukan setiap bulan satu kali. Pertemuan dihadiri oleh kader dan pengurus PKK dari delapan desa yang ada, mereka yang diundang terdiri dari ketua TP PKK Desa, Sekretaris TP PKK Desa, dan Ketua Pokja I sampai dengan Pokja IV masing-masing desa. Sehingga ketika diadakan lokakarya juga mudah untuk menghadirkan mereka.
3. Kegiatan lokakarya/ *workshop* Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan SIM PKK Berbasis Komunitas di Kecamatan Imogiri merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menambah pengetahuan dan menggugah semangat kader dan pengurus PKK dalam pengisian data format SIM PKK. Karena selama ini para kader sudah mempraktikkan pengisian data tersebut, namun mereka belum mengetahui hal tersebut merupakan bagian dari format SIM PKK serta belum mengetahui manfaatnya bagi pengambilan kebijakan. Tim pengabdian diharapkan untuk melakukan kegiatan lokakarya pada tingkat Dasawisma sebagai basis pengisian data.

Permasalahan yang dihadapi dalam lokakarya/*workshop* pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK berbasis komunitas di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sehingga menjadi faktor penghambat kegiatan antara lain:



1. Pada waktu kegiatan lokakarya dilaksanakan, di kompleks Kecamatan Imogiri juga sedang dilaksanakan pembangunan gedung baru yang direncanakan untuk ruang pelayanan satu atap yang selama ini masih menjadi satu dengan bangunan kantor lama. Pelaksanaan pembangunan gedung baru yang terletak di sebelah barat pendhapa kecamatan tersebut menimbulkan suasana yang kurang nyaman dalam pelaksanaan pelatihan. Selain itu ada truk pengangkut material keluar masuk kompleks sehingga menimbulkan suara bising dan debu.
2. Di dua desa di Kecamatan Imogiri yaitu Desa Karang Tengah dan Desa Giri Rejo kebetulan pada waktu pelaksanaan lokakarya di Kecamatan juga sedang berlangsung kegiatan lain sehingga ada peserta yang tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan. Ada beberapa peserta yang mohon izin untuk kemudian mengikuti kegiatan di tingkat Desa yang waktunya bersamaan.
3. Bangunan pendhapa cukup terbuka serta terletak persis di pinggir jalan raya sehingga suara bising yang berasal dari lalu lintas kendaraan yang lewat cukup mengganggu suasana lokakarya.

#### **D. Organisasi Pelaksana**

##### 1. Ketua Pelaksana

- |                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| a. Nama dan gelar Akademik      | : Dwi Harsono, MPA, MA                      |
| b. Pangkat/Golongan/NIP         | : Penata Tk. I /IIIId/19740115 200112 1 001 |
| c. Jabatan Fungsional           | : Lektor                                    |
| d. Bidang Keahlian              | : Kebijakan Publik                          |
| e. Fakultas/Program Studi/Pusat | : FIS/Ilmu Administrasi Negara              |
| f. Waktu untuk Kegiatan ini     | : 5 jam/minggu                              |

1. Anggota Pelaksana I

- a. Nama dan gelar Akademik : Marita Ahdiyana, M. Si.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda Tk. I/ IIIb/19730318 200812 2 001
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang Keahlian : Manajemen Pelayanan Publik
- e. Fakultas/Jurusan/Pusat : FIS/Ilmu Administrasi Negara
- f. Waktu untuk Kegiatan ini : 5 jam/minggu

2. Anggota Pelaksana II

- a. Nama dan gelar Akademik : Kurnia Nur Fitriana, S. IP
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda, IIIa/19850623 200812 2 002
- c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
- d. Bidang Keahlian : Manajemen Pelayanan Publik
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : FIS/Ilmu Administrasi Negara
- f. Waktu untuk Kegiatan ini : 5 jam/minggu

4. Mahasiswa I

- a. Nama : Oktaviani
- b. NIM : 10417141010
- c. Unit Kerja : FIS/ Ilmu Administrasi Negara
- d. Tugas/Aktivitas dalam PPM : Membantu mendampingi kegiatan PPM

5. Mahasiswa II

- a. Nama : Deby Febriyan Epriliano
- b. NIM : 10417141007

- c. Unit Kerja : FIS/ Ilmu Administrasi Negara
- d. Tugas/Aktivitas dalam PPM : Menyiapkan bahan kegiatan PPM

6. Mahasiswa III

- a. Nama : Mifta Damai Rianingtyas
- b. NIM : 0941714403
- c. Unit Kerja : FIS/ Ilmu Administrasi Negara
- d. Tugas/Aktivitas dalam PPM : Membantu mendampingi kegiatan PPM

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan kegiatan PPM telah berjalan baik dan mendapat tanggapan dan apresiasi positif dari peserta. Walaupun tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan berbasis komunitas di lingkungan mereka masing-masing di Kecamatan Imogiri belum serta merta dapat terlaksana, namun demikian tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peran kader dan anggota PKK dalam penerapan SIM PKK di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul telah terlaksana. Sebagian peserta telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang SIM PKK serta manfaatnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan data akurat bagi pengambilan kebijakan dan input berharga untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan Tim PPM adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kegiatan PPM lokakarya pemberdayaan masyarakat dalam penerapan SIM PKK pada tiap-tiap Dasawisma sebagai basis data isian format SIM PKK.
2. Perlu kerjasama dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pemerintah Kabupaten Bantul untuk melatih dan menggerakkan kader dan pengurus PKK dalam penerapan SIM PKK di seluruh Dasawisma yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul untuk mendukung ketersediaan data yang akurat bagi pengambilan kebijakan dan untuk input perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien, A. Mappadjantji. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Amien, A. Mappadjantji, 2003. *Kemandirian Lokal Perspektif Sains Baru terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan*. Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Ostrom, Elinor. 1994. *Neither Market Nor State: Governance of Common-Pool Resources in the Twenty-first Century*. Presented June 2 1994. International Food Policy Research Institute. Washington, DC.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. PDF e-book.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

### Referensi Website dan SKH:

- <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/3108/inovasi-sistem-informasi-manajemen-pkk-mulai-diterapkan.html>. 22/3/2013.
- <http://www.jatengtime.com/2012/wanita/sim-pkk-desa-plodongan-dikaji-pemerintah-pusat/>. 22/3/2013
- [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com), 9 November 2012. PKK Seram Belajar Penangann KDRT Berbasis Komunitas (baskom). 22/3/2013.
- Kedaulatan Rakyat, 13 November 2011. SIM PKK Mudahkan Pencatatan Administrasi.